



**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

- Rapat ke : 6 (enam)
- Tahun Sidang : 2015-2016
- Masa Persidangan : III
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI/ke-2
- Dengan : Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ketua Umum Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI), Perwakilan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Perwakilan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan Perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
- Hari, Tanggal : Senin, 25 Januari 2016
- Pukul : 10.30 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka
- Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP
- Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Kesiapan dunia Industri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam kerangka kebijakan politik luar negeri Indonesia.
- Hadir : 1. .... .. orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI  
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc.  
3. Dagang dan Industri Indonesia, diwakili oleh Shinta Wijaya Kamdani  
4. Asosiasi Pengusaha Indonesia, diwakili oleh Ketua Asia Pasifik Afrika Bernardino Vega  
5. Ketua Umum Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, diwakili oleh Direktur PT Suma Jaya DR. Azwir Dainy Tara, MBA  
6. Ketua umum Ikatan Akuntan Indonesia, diwakili oleh Anggota Dewan Pengurus Nasional Prof. Sidharta Utama  
7. Persatuan Insinyur Indonesia, diwakili DR. Ir. Hermanto Dar Dak

8. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia diwakili oleh Drs. Sudrajat, MM beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ketua Umum Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua umum Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia dan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP

## **II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN :**

Komisi I DPR RI telah menerima pandangan dan masukan dari Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Masukan dan pandangan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah khususnya mitra kerja Komisi I DPR RI.

Beberapa pokok pembicaraan diantaranya :

1. Dengan telah berlakunya MEA, keterbukaan/pasar bebas ASEAN tidak dapat dihindari. Industri Dalam Negeri harus dapat mempertahankan teritorialnya dan apabila memungkinkan dapat memperluasnya. Pemerintah harus tetap memberikan proteksi terhadap industry dalam negeri.
2. Sektor industri yang penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi seperti di sektor agro, yaitu kehutanan, kelapa sawit, dan tembakau, memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.
3. Dengan berlakunya MEA, akan banyak investor masuk ke Indonesia. Peluang ini harus dapat dimanfaatkan karena berpotensi menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Namun demikian kualitas SDM kita masih di bawah negara ASEAN yang lain. Untuk itu BNSP perlu mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) disemua sektor, termasuk sektor teknologi informasi.
4. Pemerintah kurang melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan MEA, khususnya untuk Industri Kecil dan Menengah, untuk itu Pemerintah harus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.
5. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap warga asing mengingat penerapan peraturan bebas visa untuk WNA yang masuk ke Indonesia semakin diperluas. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan ijin tinggal (visa) oleh WNA, mengingat banyak terjadi

WNA dengan visa turis namun disalahgunakan dengan mencari penghasilan (kerja di Indonesia). Harus ada koordinasi yang intensif diantara Instansi terkait.

6. Pemerintah perlu mendeteksi jumlah WNA yang berprofesi di semua sektor baik sektor industry maupun sektor jasa.
7. Perlu ada regulasi atau peraturan yang mengharuskan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia dapat berbahasa Indonesia. Hal ini juga dapat melindungi Tenaga Kerja Dalam Negeri.
8. Dari media yang ada di Indonesia khususnya Televisi, harus ada porsi pendidikan untuk masyarakat, jadi tidak hanya sinetron. Hal ini pengaruhnya cukup besar apabila ketentuan ini masuk dalam UU, bahwa ada porsi tertentu untuk pendidikan.
9. Banyak produk asing lebih dominan, hal ini karena pengusaha kita lemah dalam menganggarkan promosi, diharapkan semua asosiasi memasukkan anggaran promosi, karena tanpa promosi tidak akan dikenal.
10. Subsidi anggaran untuk sertifikasi dari pemerintah untuk persiapan MEA baru terealisasi pada pertengahan tahun. Hal ini menjadi kendala bagi LSP, karena tidak semua LSP mampu melakukan tanpa anggaran subsidi tersebut.
11. Main site dalam menghadapi MEA harus diubah. Mengusulkan ke Menteri Luar Negeri agar melakukan market intelejin. Hal ini untuk menata sertifikasi dan untuk mengetahui bidang atau sektor apa saja yang sedang dibutuhkan di negara lain (khususnya negara ASEAN).
12. Sertifikasi dilakukan oleh LSP yang ada di Kementerian/Lembaga, namun ketersediaan data tenaga kerja yang kompeten tidak tersedia. Mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa menjadi instansi yang menangani ketersediaan informasi/data tersebut bekerja sama dengan BKPM.
13. Pada dasarnya, perlu ada koordinasi yang sangat ketat diantara instansi Pemerintah terkait untuk menghadapi MEA sehingga dapat bersaing dan unggul dari negara ASEAN yang lain.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2016  
**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**H.A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP**  
**A-486**